



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/343 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/40 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang pensiun, untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/254 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

*[Handwritten signature]*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/40 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga; dan
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955/343 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955/40 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT YANG  
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT  
 PERINTAH MEMBAYAR DAN PENGESAHAN  
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
 MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI  
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> drg. Tanti Yuliasuti, M.M. NIP. 19690722 200312 2 004	Kepala	UPTD Puskesmas Karangjambu	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> dr. Rina Anggraini NIP. 19871125 201412 2 001	Plt. Kepala	UPTD Puskesmas Karangjambu	Pejabat Penandatanganan dan Pengesahan SPJ
2.	<u>Lama</u> Istomo Puji, SKM NIP. 19660315 198703 1 014	Kepala	UPTD Puskesmas Kejobong	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> dr. Dyah Kurniasih NIP. 19830811 201412 2 001	Plt. Kepala	UPTD Puskesmas Kejobong	Pejabat Penandatanganan dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI